



ADAKAH MASA DEPAN BEBAS KORUPSI DI INDONESIA? PERSPEKTIF PENDIDIK

ABDUL HAMID

KEPALA LAB ILMU EMERINTAHAN FISIP UNTIRTA

ABDUL HAMID ALIAS ABAH HAMID

- Kepala Lab Ilmu Pemerintahan Untirta, juga Ketua Komisi Kerjasama, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Senat Untirta.
- Menempuh Pendidikan tinggi di Ilmu Politik UI (S1), Ilmu Politik UNDIP (S2) dan Graduate School of Global Studies, Doshisha University (S3).
- Meminati kajian politik lokal dan desentralisasi, *policy and politics of higher education* dan politik digital. Menuliskannya di beberapa paper di jurnal internasional dan nasional, serta juga menjadi reviewer beberapa jurnal.
- Pernah menjadi Visiting Researcher di Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University tahun 2008 dan 2011. Sekarang belajar menjadi youtuber ([youtube.com/abahhamid](https://www.youtube.com/abahhamid)) dan blogger (abdulhamid.id)



Abah Hamid
Berbagi, Merawat Kewarasan

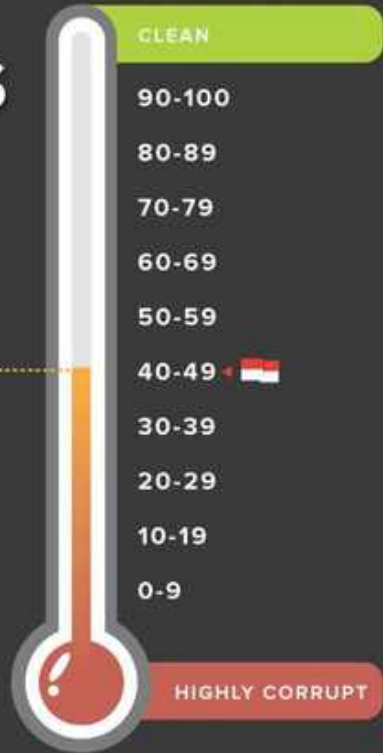
INDONESIA'S CPI 2019

(Corruption Perception Index)

Score **40**

Rank **85**

Sumber: Transparency International



CPI 2019

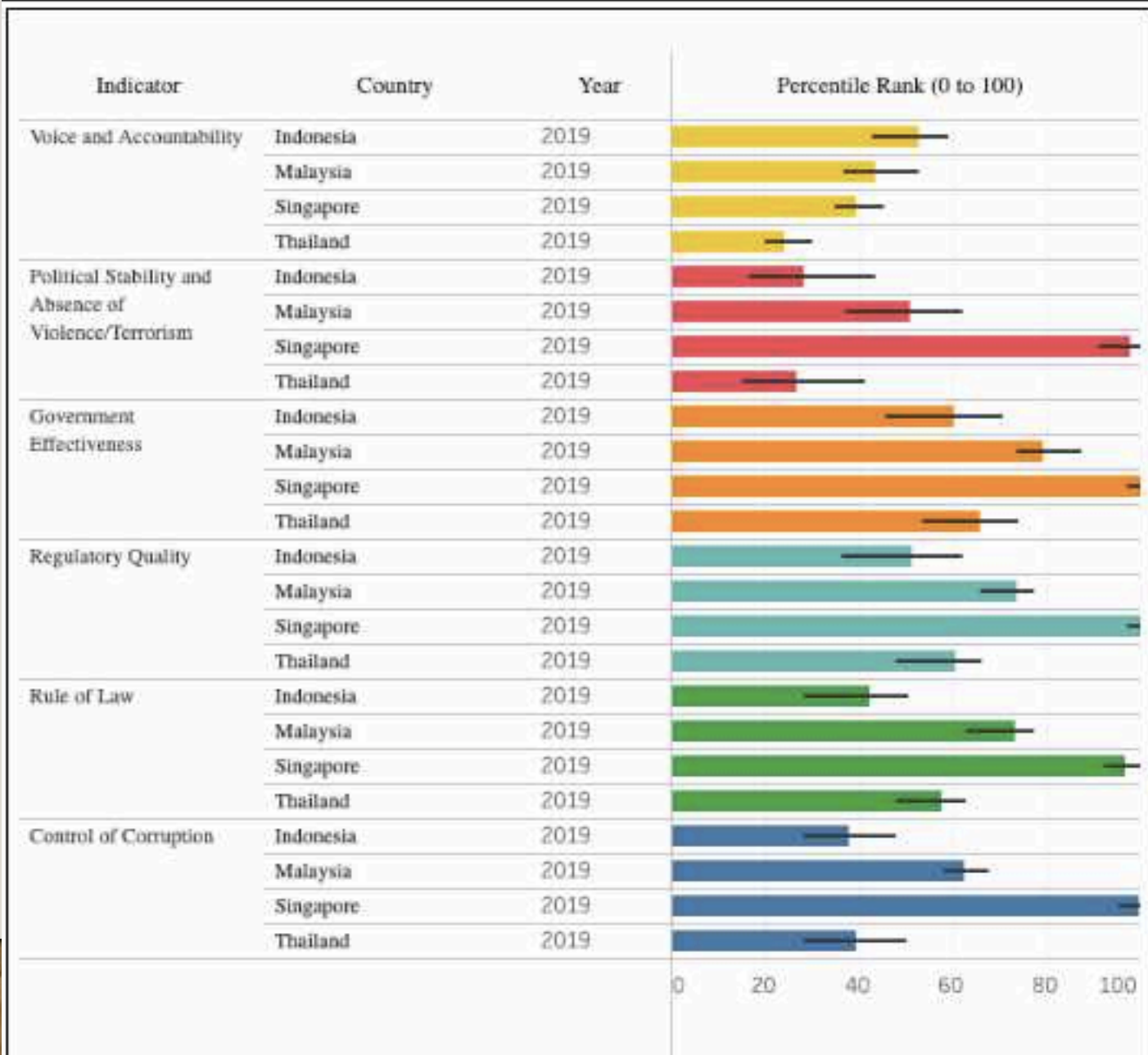
IDN TIMES

CPI Indonesia Dalam Satu Dekade



Sumber: Transparency International Indonesia

Worldwide Governance Indicators

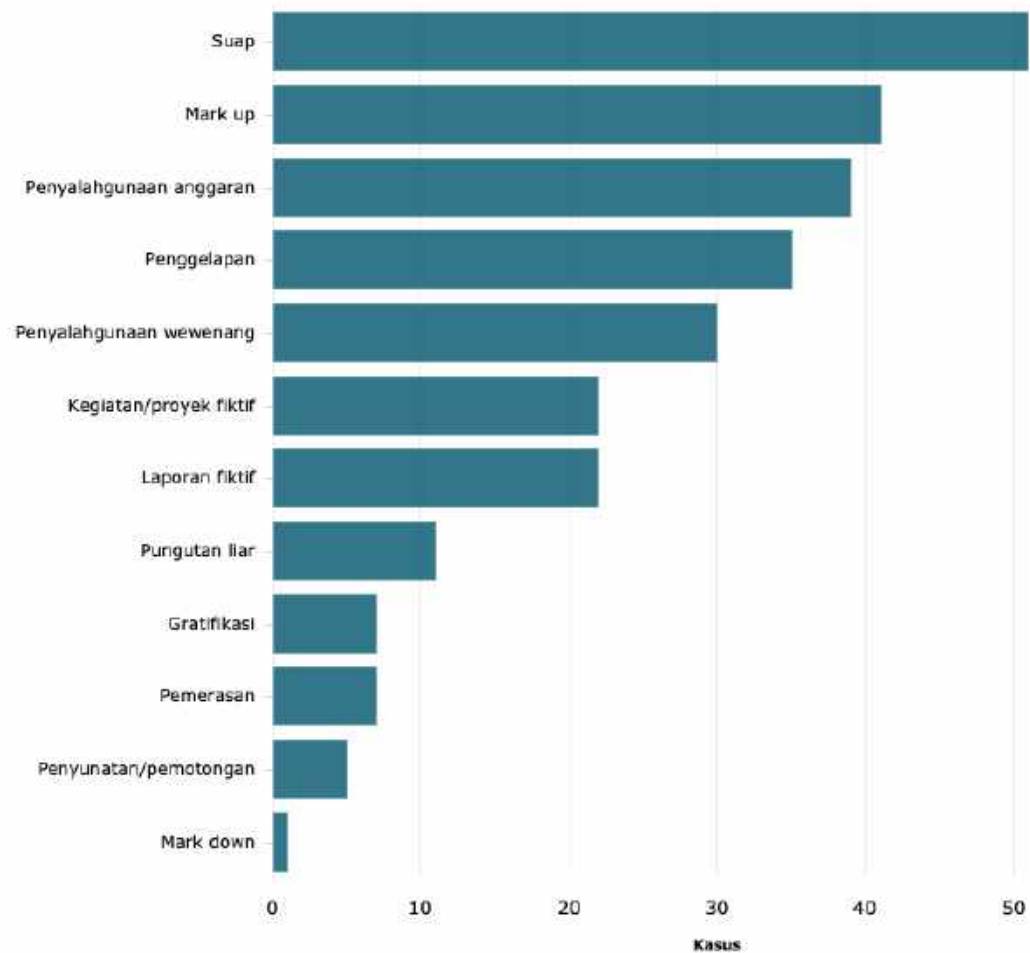


GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX

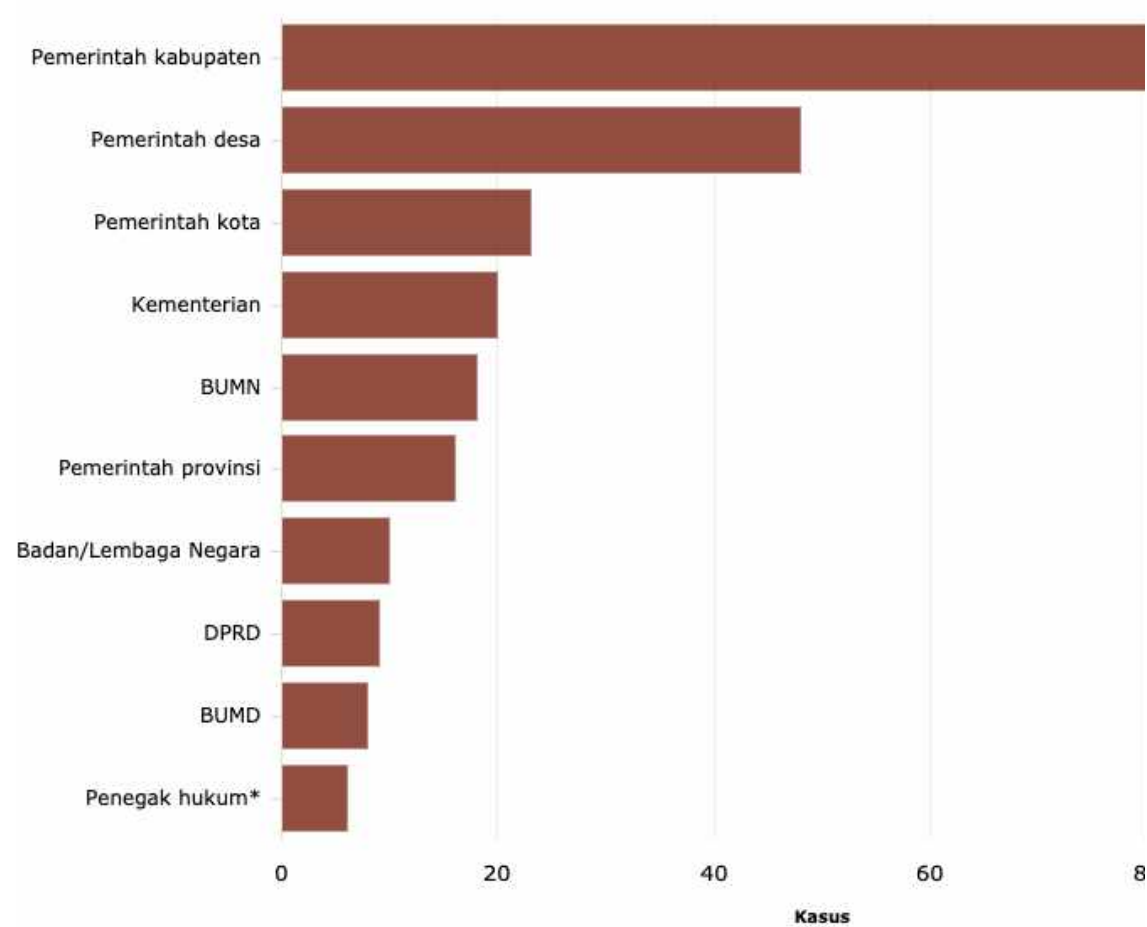
Perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.



Jumlah Kasus Berdasarkan Modus Korupsi (2019)



Kasus Korupsi di Lembaga Pemerintah



Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi di **Lingkup Publik**

Persentase Masyarakat yang Menganggap “Wajar” Korupsi di Lingkup Publik



- ✓ Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin permisif terhadap korupsi.
- ✓ Kenaikan persentase tertinggi adalah **menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada PILKADES/PILKADA/PEMILU**

1 Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada PILKADES/PILKADA/PEMILU

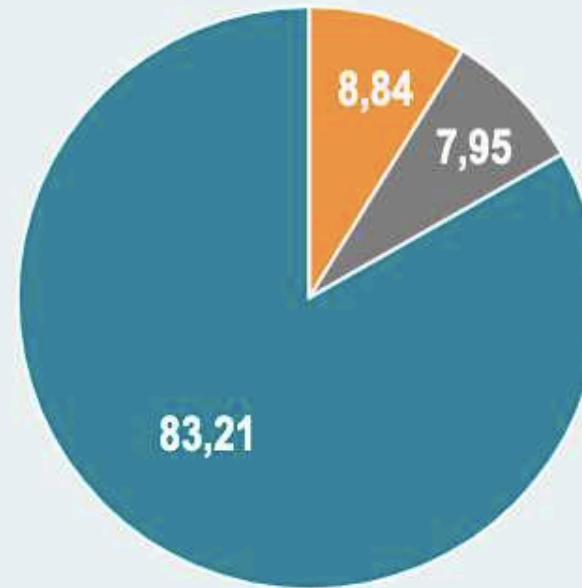
2 Pihak sekolah (guru/kepala sekolah/komite sekolah) meminta uang/barang/fasilitas dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor

3 Peserta PILKADES/PILKADA/PEMILU membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih

4 Memberi uang/barang/fasilitas untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll

5 Memberi uang/barang/fasilitas kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi kependudukan (KTP, KK, SKTM, dll)

Persentase Masyarakat yang Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan Ketika Berurusan dengan Layanan Publik, Tahun 2020



■ Ya, sendiri ■ Ya, dengan perantara ■ Tidak

SDG's Goal 16.5.1

16,79 persen masyarakat membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara pada tahun 2020.

PADAHAL...

KITA ADA DI **TAHAP**

FINAL PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Gambar 12. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode



Sasaran RB 2010-2014

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi



Sasaran RB 2015-2019

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas



Sasaran RB 2020-2024

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang kapabel

Pelayanan publik yang prima



Pemerintahan yang **baik dan bersih**

Indikator Outcome:
Indeks Reformasi Birokrasi

- Indikator Impact:**
1. *Ease of Doing Business*
 2. *Corruption Perceptions Index*
 3. *Government Effectiveness Index*
 4. *Trust Barometer*

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- Indikator:**
1. Indeks Perilaku Anti Korupsi
 2. Nilai SAKIP
 3. Opini BPK

Birokrasi yang kapabel

- Indikator:**
1. Indeks Kelembagaan
 2. Indeks SPBE
 3. Indeks Profesionalitas ASN

Pelayanan publik yang prima

Indikator:
Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem informasi pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi)

SYUKURLAH...

SURVEY INDEKS PERSEPSI

ANTI KORUPSI

MENUNJUKKAN BAHWA

MASYARAKAT KITA

SEMAKIN ANTI KORUPSI

IPAK Indonesia 2020 sebesar **3,84** dari skala 0 – 5. Angka ini **lebih tinggi 0,14 poin** dibandingkan dengan IPAK 2019 sebesar 3,70.

3,84



Makna Indeks

- ✓ Semakin mendekati 5, masyarakat cenderung semakin ANTI KORUPSI,
- ✓ Semakin mendekati 0, masyarakat cenderung semakin permisif terhadap korupsi.

Perkembangan IPAK Menurut Dimensi, 2012-2020

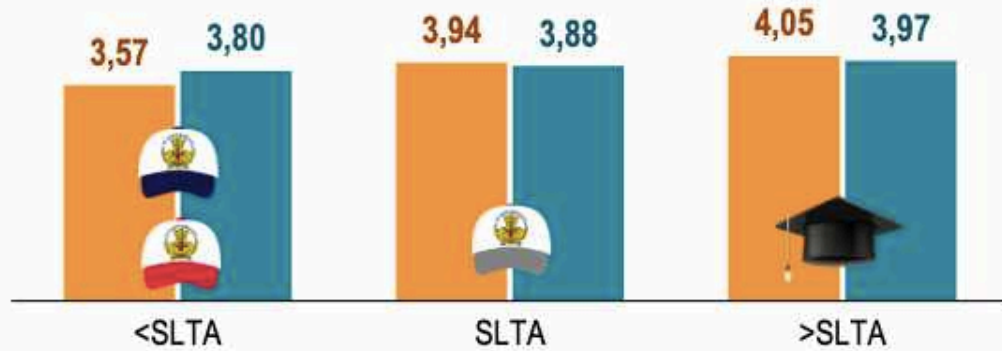


- ✓ Dari dimensi persepsi, menunjukkan masyarakat **semakin permisif** terhadap korupsi di tahun 2020
- ✓ Dimensi pengalaman cenderung fluktuatif, tetapi **semakin anti korupsi** di tahun 2020
- ✓ IPAK 2020 naik dibanding IPAK 2019



IPAK Menurut Karakteristik Responden, 2019 - 2020

Pendidikan



Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi

Kelompok Umur



Penduduk yang berusia kurang dari 40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya



KETERANGAN:

2019 2020

Status Wilayah



Masyarakat perkotaan lebih anti korupsi dibanding masyarakat perdesaan



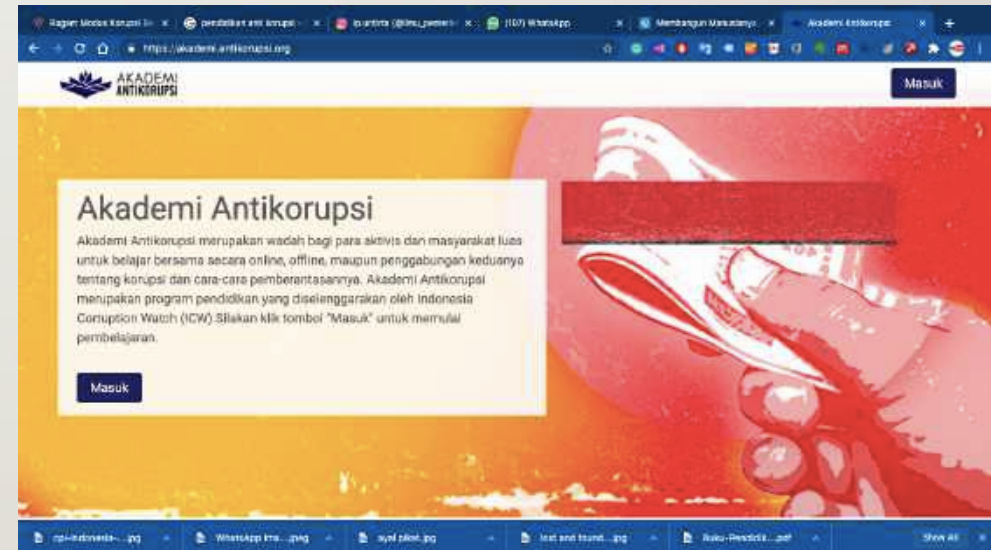
ARTINYA....

- Millennial (<40) adalah generasi pembuka yang lebih anti korupsi.
- Pendidikan berpengaruh terhadap sikap anti korupsi.
- Keterbukaan akses terhadap informasi dan tersedianya berbagai fasilitas juga mendukung tumbuhnya sikap antikorupsi.
- Terdapat peluang menghasilkan generasi baru anti korupsi di Indonesia, **ketika generasi muda masuk ke sektor-sektor publik** menggantikan generasi sebelumnya.

**BERARTI...
SELAIN PENGUATAN SISTEM
DAN PENINDAKAN,
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI BAGIAN DARI
PENCEGAHAN HARUS
MENDAPAT PORSI SERIUS, DI
SEMUA JENJANG PENDIDIKAN**

MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PRODI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNTIRTA

- Merupakan mata kuliah wajib, menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang berkarakter anti korupsi.
- Perkuliahan blended learning, paduan antara materi yang dikembangkan oleh Pengampu dan Materi Akademi Anti Korupsi.
- Mahasiswa begitu lulus mata kuliah selain mendapatkan nilai dari Dosen, juga sertifikat dari Akademi Anti Korupsi.





ilmu_pemerintahan_u • Following



Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



ilmu_pemerintahan_untirta

Alhamdulillah, kegiatan dialog dan launching e learning Pendidikan Anti Korupsi berjalan lancar. Terima kasih atas bantuan segala pihak. Semoga kolaborasi ini bermanfaat bagi upaya kita membangun integritas anak bangsa, memelihara harapan untuk Indonesia lebih baik.

109w



Liked by kartikurt and 77 others

AUGUST 31, 2018

Add a comment...

Post



ilmu_pemerintahan_u • Following



Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



ilmu_pemerintahan_untirta Mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi berpose bersama Dosennya Pak Rizki Godjali sambil menunjukkan Sertifikat dari Akademi Anti Korupsi setelah menamatkan modul kuliah online. Selamat yaaaa

102w



Liked by megawatipertiw1 and 85 others

OCTOBER 19, 2018

Add a comment...

Post

TAPI....

- Pendidikan anti korupsi tidak boleh sekedar menjadi “mata kuliah” atau “mata pelajaran” yang berorientasi nilai yang tinggi, tapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan karakter.
- Pengalaman di negara maju, pendidikan karakter untuk hidup “bersih” sebagai sesuatu yang normal, terbangun melalui serangkaian aktivitas dalam proses pembelajaran semenjak dini.



KESIMPULAN

- ✓ Individu-individu yang terdidik baik dan memiliki sikap anti korupsi akan menjelma pada saatnya menjadi birokrat anti korupsi, polisi anti korupsi, dosen anti korupsi, tentara anti korupsi, petani anti korupsi, pengusaha anti korupsi, calon bupati anti korupsi, anggota dpr anti korupsi, menteri anti korupsi, dan presiden anti korupsi.
- ✓ Keseluruhannya adalah masyarakat dan bangsa anti korupsi.
- ✓ Selesai....